



Media: BERNAS

Hari: Minggu

Tanggal: 28 Mei 2017

Halaman: 1

Pencairan Dana RW Diperketat

JOGJA, BERNAS - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai memperketat pencairan dana stimulan kepada Rukun Warga (RW) senilai Rp10 juta. Dana stimulan itu hanya akan dicairkan kepada RW yang sudah menyerahkan laporan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Sedangkan bagi RW yang tak menyampaikan laporan, tidak berhak menerima dana pada tahun berikutnya.

"Kita membutuhkan laporan penggunaan anggaran, namun sayangnya ada RW yang tidak beres dalam pelaporan, karena itu tidak dikeluarkan (dicairkan) anggarannya," kata Octo Noor Arafat, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, Sabtu (27/5).

Di Kota Yogyakarta ada 616 RW. Beberapa diantaranya tidak terhib administrasi dengan menyampaikan laporan penggunaan anggaran senilai Rp10 juta yang telah diterimanya. "Saya tidak hafal RW mana saja, tapi ada," kata Octo.

Menurut Octo, tahun ini merupakan yang terakhir dana stimulan RW dikelolanya, karena tahun depan beralih dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta.

► ke hal 7

Sambungan dari hal 1

karta. Untuk itu bagi RW yang belum merampungkan laporan keuangannya diminta segera menyelesaikan. "Tetap kami tagih yang laporannya belum beres," katanya.

Octo menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya dana stimulan RW diberikan sebesar Rp10 juta. Untuk penggunaannya, Octo mengatakan sudah ada arahan dan larangan. "Seperti untuk pembelian tenda dan kursi," katanya mencontohkan.

Pihaknya juga memberikan peringatan bagi RW yang kembali mengusulkan kebutuhan yang sama seperti tahun lalu sudah beli kursi tahun ini dianggarkan lagi," ujarnya.

Menurut Octo, tiap RW di kampung sebenarnya diarahkan untuk saling berkoordinasi. Hal itu untuk menghindari pembelian barang yang sama. Justru, tambahnya, tiap RW diminta saling melengkapi, sehingga barang yang dibeli bisa dimanfaatkan semua. "Dalam satu kampung kan ada beberapa RW. Untuk pengembangan kampung harusnya tiap RW saling melengkapi," ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Agusnur, mensinyalir adanya RW yang belum laporan tersebut karena ketidaktahuan dalam format laporan. Pihaknya meminta Dinas terkait untuk memberikan pelatihan pembuatan proposal dan laporan keuangan ke RW. "Sejak dari penyusunan proposal harus didampingi supaya yang dibeli juga sesuai," sarannya.

Namun, Agusnur juga mengatakan setiap anggaran yang dikeluarkan dari APBD harus dipertanggungjawabkan penguasaannya. Karena itu tiap RW sudah terlanjur menerima pencairan dana stimulan namun belum membuat laporan penggunaan anggaran, diminta segera menyelesaikan. "Saya setuju. Tidak cukup hanya tidak diberikan lagi, tapi laporan tahun sebelumnya tetap harus ditagih," tandasnya (age)

Pit. Kepala Sekretaris
Titik
Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 196907231996031005

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

*-Din. Pemberdayaan masy, perempuan & perlindungan anak
R/ kecer
R/ BTAsa*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005